

Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	ix, 133 hal. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.KANSIL, CHRISTINE S.T.
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HUKUM MEREK
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama : Liedarmawan Chandra (NIM: 205060066) (B) Judul Skripsi : Penghapusan Merek Special Slimming Tea Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Contoh Kasus Putusan Nomor: 31/MEREK /2009/PN.Niaga.Jkt.Pst) (C) Halaman : ix + 133 + 37 + 2010 (D) Kata Kunci : Penghapusan Merek, Hukum Merek. (E) Isi : Merek merupakan salah satu hak milik industri yang penting dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pada tahun 2009 terjadi kasus gugatan penghapusan merek yang diajukan PT Mustika Ratu, Tbk sebagai pemilik merek terdaftar Slimming Tea terhadap pemilik merek terdaftar Special Slimming Tea yaitu PT Phyto Kemo Agung Farma. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan menghasilkan Putusan Nomor: 31/MEREK/2009/PN.Niaga. JKT.PST yang isinya menyatakan Slimming Tea sebagai merek, ada itikad tidak baik dari PT Phyto Kemo Agung Farma, ada persamaan pada pokoknya antara merek Slimming Tea dengan merek Special Slimming Tea, ada ketidaksesuaian antara penggunaan merek Special Slimming Tea yang digunakan dalam perdagangan barang dengan apa yang didaftarkan, sehingga diputuskan penghapusan merek bagi merek Special Slimming Tea. Permasalahannya adalah apakah putusan Nomor: 31/MEREK /2009/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, didukung dengan melakukan wawancara kepada Ditjen HKI, penggugat yaitu PT Mustika Ratu, Tbk, dan ahli serta praktisi hukum di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan isi Putusan Nomor: 31/MEREK/2009/PN.Niaga.JKT.PST. Kesimpulannya adalah Putusan Nomor: 31/MEREK/2009/PN.Niaga.JKT.PST telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.Penulis memberikan saran sebaiknya Ditjen HKI merumuskan peraturan pelaksanaan mengenai kriteria batasan penggunaan merek yang boleh tidak sesuai dengan apa yang didaftarkan dan peraturan pelaksanaan mengenai kriteria keterangan atas barang. (F) Acuan : 44 (1887-2009) (G) Pembimbing Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. (H) Penulis Liedarmawan Chandra</p>